

Partisipasi aktif milenial dalam demokrasi: Bagaimana kaum Gen Z dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam partisipasi aktif mereka dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan umum, kampanye sosial, dan gerakan politik

Nazira Rashiqa Zahra^{1*}, Nur Azka Nabilla², Selvy Rahmah³

^{1,2,3}Program studi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: ¹230301110036@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

bawaslu; media sosial;
milenial; politik; gen z

Keywords:

bawaslu; milenial; politic;
social media; gen z

ABSTRAK

Supremasi hukum diartikan sebagai memprioritaskan hukum untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam masyarakat, politik, dan kenegaraan. bahkan ada yang mengatakan sangat buruk. Pada masa ini dianggap bahwa generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat sistem demokrasi. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk Indonesia adalah kaum milenial. Menurut survei yang dilakukan oleh Atma Jaya Institute for Public Policy (AJIPP), generasi milenial menganggap sistem demokrasi Indonesia buruk—bahkan

sangat buruk. Melalui tulisan ini dengan studi literatur yang telah dilakukan, tulisan ini dapat membedah bagaimana kaum Gen Z dapat mengintegrasikan nilai pancasila dalam dunia politik. Berdasarkan literatur bahwa dapat diintegrasikan melalui media sosial, konten digital dari lembaga pemerintahan, dan program yang diakui oleh Bawaslu.

ABSTRACT

The rule of law is defined as prioritizing law to solve problems that arise in society, politics, and statehood. Some even say very bad. At this time it is considered that the younger generation has a very important role in strengthening the democratic system. This is because most of Indonesia's population are millennials. According to a survey conducted by the Atma Jaya Institute for Public Policy (AJIPP), millennials consider Indonesia's democratic system to be bad—even very bad. Through this article and the literature study that has been carried out, this article can dissect how Gen Z can integrate Pancasila values in the world of politics. Based on the literature, it can be integrated through social media, digital content from government institutions, and programs recognized by Bawaslu.

Pendahuluan

Secara singkat, supremasi hukum dapat di artikan sebagai memprioritaskan hukum untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam masyarakat, politik, dan kenegaraan. Permasalahan pada penegakkan hukum hanyalah salah satu dari banyak aspek hubungan antara negara, hukum, dan masyarakat di negara hukum demokrasi. Supremasi hukum haruslah dipahami sebagai supremasi hukum dalam suatu negara



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

hukum demokrasi. Supremasi hukum ini harus dianggap sebagai supremasi hukum di negara hukum demokrasi. Suatu negara hukum memiliki lima prinsip dasar yang berfungsi sebagai dasar negara hukum demokrasi tersebut. Demokrasi merupakan jenis pemerintahan di mana setiap warga memiliki hak yang sama untuk membuat keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka. Demokrasi memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, budaya dan adat yang memungkinkan kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga berarti menghargai martabat dan harkat manusia.

Semua warga negara Indonesia harus mempelajari, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan dasar falsafah negara yang ditetapkan pada pembukaan UUD 1945 (Miftahusyai'an, 2021). Pada masa sekarang dianggap bahwa generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat sistem demokrasi. Ini disebabkan sebagian besar penduduk Indonesia adalah kaum milenial. Indonesia menganggap era milenial sebagai penghargaan segmen karena mereka datang ke dunia pada masa inovasi dan mulai berkembang pesat. Banyak ide-ide baru yang masuk ke Indonesia dengan nilai-nilai positif dan negative dan fungsi Pancasila disini sebagai pencegah ide-ide baru yang merugikan dan merusak kepribadian generasi berikutnya (Miftahusyai'an, 2021). Generasi milenial adalah harapan masa kini dan masa depan Indonesia. Generasi milenial harus berperan sebagai pemecah masalah dengan berbagai masalah, salah satunya adalah politik. Namun, perhatian kaum milenial terhadap masalah politik mulai menurun. Ini disebabkan oleh banyaknya orang yang melihat “isu politik” cenderung memperubutkan kekuasaan dan menganggap politik sebagai lingkaran tak berujung. Generasi milenial harus mengubah perspektif ini lalu memilih. Begitu pula dengan masalah demokrasi Indonesia, generasi milenial terus mengabaikan perbaikan sistem pemilihan.

Menurut survei yang dilakukan oleh *Atma jaya Institute for public Policy (AJIPP)*, generasi milenial menganggap sistem demokrasi Indonesia termasuk buruk, bahkan sangat buruk. Politisi agama adalah penyebab langsung dari persepsi buruk 44% milenial tentang demokrasi Indonesia. Menurut hasil lain, presentasi yang disebabkan oleh hoax sebanyak 22%, pencemaran nama baik sebanyak 17%, korupsi 11%, kekuatan penguasa adalah 1 % dan lain-lain sebanyak 3%. Oleh karena itu, penting bagi kaum milenial untuk memahami proses dan cara kerja bagaimana mereka memengaruhi persepsi mereka tentang masalah politik (Zaman, 2023). Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi di Indonesia terhambat oleh politisasi agama. Demokrasi juga sering dikaitkan dengan agama dan beberapa pihak secara teratur menggunakan agama sebagai alat politik.

Politisasi agama ini mengganggu demokrasi negara. Ditambah dengan eskalasi korupsi, radikalisme, kekuatan para penguasa dan banyaknya penipuan yang secara luas diakui oleh masyarakat umum. Faktor-faktor seperti inilah yang sering menjadi alasan mengapa generasi milenial tidak terlalu tertarik pada demokrasi Indonesia. Mereka melihatnya hanya sebagai politisasi agama, radikalisme dan kekuasaan. Di sisi lain, kaum milenial sebenarnya memiliki banyak pilihan yang dapat mereka lakukan untuk membantu memahami sistem demokrasi yang lebih baik di Indonesia, sehingga mereka tidak selalu ditundukkan dengan mencari kebebasan untuk mendapatkan kekuasaan

untuk memenuhi kebutuhan finansial. Karena demokrasi sendiri pada dasarnya berasal dari rakyat. Sidney Hok menyatakan bahwa “demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan penting pemerintahan didasarkan pada suatu kesepakatan mayoritas yang tercipta dari suara rakyat”, maka dari itu, suara rakyat harus menjadi sumber, bukan suara kelompok tertentu.

Kecanggihan teknologi modern dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk mengurangi hal-hal buruk. Generasi milenial merupakan generasi yang sangat mahir dalam memanfaatkan teknologi. Dengan kemampuan mereka dalam bidang teknologi dan kerangka kerja yang ada, generasi milenial memiliki banyak peluang atau potensi untuk tetap berada di depan dari generasi sebelumnya. Dengan teknologi, mereka dapat menangani sekaligus mengawasi pelaksanaan demokrasi. Mereka dapat mengawasi dan mengelola implementasi demokrasi berkat teknologi. Kontrol ini memungkinkan mereka mengukur kemajuan demokrasi negara. Selain itu, dapat dilakukan pula pengadaan ruang terbuka melalui media online dan menekankan pentingnya peran generasi milenial dalam meningkatkan demokrasi. Dapat pula dilakukan pengiklanan hastag positif di media online untuk mencegah golput. Saat ini media online dapat menjadi alat untuk menyuarakan segala sesuatu. Namun, sebelum hal itu dilakukan, tentunya langkah pertama yang harus dilakukan yaitu melahirkan persoalan dalam diri setiap orang bahwa sebagai warga Indonesia kita harus acap memikirkan bangsa dan tidak menjadi orang yang apatis terhadap politik (Ramadhan, 2022).

Ditinjau dari kondisi sekarang, demokrasi yang berjalan di negara Indonesia masih jauh dari apa yang di harapkan. Seiring dengan kemajuan teknologi, banyak tersebar isu-isu yang meresahkan banyak masyarakat terutama dalam bidang politik dan pemerintahan. Dengan demikian, kesadaran diperlukan oleh setiap orang terutama kaum milenial untuk melakukan perubahan lingkungan mereka, seperti pada bidang politik dan lainnya. Karena generasi milenial merupakan generasi yang akan memimpin dan membangun negara ini untuk memperbaiki keadaan. Kewaspadaan sejak era milenial sangat penting untuk membangun nasib akhir negara ini.

Pembahasan

Generasi milenial adalah generasi yang tidak bisa terlepas dari teknologi karena itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan yang penting. dan mereka adalah golongan/generasi yang menempati posisi generasi yang paling sering menggunakan internet. Namun generasi milenial ini juga tergolong generasi yang rendah atau minim rasa antusias dalam kegiatan yang berbau politik. jangankan menjadi anggota ,untuk menjadi partisipasi aktif dalam mendukung politik pun rendah. Faktor sebuah keberlangsungan pemilu kebanyakan terlaksana berdasarkan antusiasme dari masyarakat itu sendiri. Salah satu hal yang berpengaruh yakni dapat juga dari perubahan akan kemajuan yang terjadi dalam pola digital yang sedang beredar, sehingga berbagai informasi kini kian maraknya tersebar di digital dan terus update. Dengan itu pemuda pemudi kini dapat ikut serta dalam pemilu ini dan generasi muda dapat berpartisipasi dalam pengawasan pemilu ini karena mereka tumbuh di zaman Dimana digital telah menjadi kebutuhan bahkan mereka mungkin sudah cukup terbiasa akan perkembangan dan perubahan teknologi saat ini (Zulkarnaen, 2020).

Walaupun sebagian besar generasi milenial tidak tertarik bahkan minim rasa ingin tau mengenai masalah politik, bagaimanapun juga para generasi muda ini juga nantinya yang akan melanjutkan perjuangan di negara ini. Para generasi muda dominan melihat gimana *progress* atau pencapaian yang sedang terjadi dalam suatu teknologi dan bagaimana keefektifan pemilu dalam media social atau teknologi. Ada saat Dimana mereka merasa terpancang atau tergerak kemungkinan besar mereka akan memodifikasi suatu Gerakan moral menuju ke gerakan sosial.

Penggunaan Teknologi Digital dalam Era Milenial

Tidak sedikit ilmuan melakukan penelitian tentang penggunaan teknologi digital dalam era milenial ini. Dalam beberapa hasil penelitiannya yang mengatakan bahwa penggunaan teknologi atau media milenial ini sudah marak di kalangan kaum milenial dan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Teknologi digital dalam kaum milenial kini sudah melekat, dan tidak bisa untuk lepas dari kebiasaannya yang ketergantungan internet terutama para generasi milenial yang hidup di kota.

Media sosial merupakan ruang digital bagi para pengguna mana penggunanya dapat berbagi pendapat dan bertukar informasi. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia merupakan negara demokrasi, yang artinya untuk dan oleh rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena generasi milenial lebih mahir menggunakan teknologi pada usia dini daripada orang-orang yang belajar di kemudian hari dalam kehidupan mereka, generasi milenial tentunya bertanggung jawab atas penetrasi internet di seluruh dunia (Susanto & Irwansyah, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu penelitian Susanto (2021), mengungkapkan bahwa rata-rata Masyarakat di Indonesia, khususnya generasi milenial cenderung lebih sering mengekspos hal-hal yang bersifat personal dan menyoroti dan/atau membahas sebuah isu politik dibanding mengungkapkan aspirasi melalui keterwakilan anggota DPR. Generasi Milenial merasa bahwa media sosial adalah pilihan yang paling mudah untuk mengemukakan suatu pendapat di ranah publik dan setiap konten yang dihasilkan bisa disesuaikan dengan kehendak penggunanya. Namun, bagi kaum milenial tetap perlu memperhatikan etika, moral, dan adab ketika mengungkapkan pendapat mengenai isu politik. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa media sosial merupakan perwujudan dari *Social Construction of Technology*, yang mana dibuktikan bahwa dalam partisipasi politik, generasi milenial cenderung aktif dalam media sosial (Susanto & Irwansyah, 2021).

Partisipasi Kaum Milenial dalam Dunia Politik

Partisipasi kaum milenial dan generasi z sangat berkaitan dengan kepercayaan mereka terhadap lembaga pemerintah, tingkat kepuasan mereka dengan kinerja pemerintah, dan pengetahuan mereka tentang pemilu. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi ketertarikan pemilih muda untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024 mendatang. Selain itu, penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada akses media sosial yang tidak begitu berpengaruh dalam mendorong partisipasi memilih, namun dorongan dari aktor politik petahan juga mempengaruhi partisipasi pemilih muda. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan partisipasi kaum muda

yang telah memilih hak untuk memilih perlu terus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu.

Pada jurnal penelitian yang kami baca, ditemukan antusias para generasi milenial dalam partisipasi politik di era milenial ini cukup tinggi. Menurut data, saat mereka diberi pertanyaan mengenai keterlibatan untuk menilai atau mengomentari dari kebijakan para pemerintah. Kurang lebih sekitar 50% mereka yang terlibat dalam partisipasi dan juga kurang lebih 50% juga mereka yang tidak terlibat.

Selain itu, meninjau dari hasil survey yang dilakukan salah satu penelitian, membuktikan bahwa diantara generasi milenial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sekitar 46% mengatakan bahwa mereka mendapatkan informasi tentang pemilihan dari media sosial, 26% dari media konvensional, sebanyak 24% dari penyelenggara pemilihan serta dari partai politik terkecil adalah 4%. Adanya hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa generasi milenial lebih sering mendapatkan informasi yang berasal dari media sosial yang kebenarannya masih dipertanyakan. Dengan demikian, perilaku dan/atau partisipasi politik generasi milenial dipengaruhi oleh teknologi yang arah geraknya cepat dan dinamis sesuai dengan hal yang praktis (Pahlevi, 2021).

Upaya Pendekatan Kaum Milenial dengan Dunia Politik

Dikarenakan kaum milenial merupakan masyarakat yang melek dengan teknologi, maka pola komunikasi pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik perlu memikirkan konten kreatif digital yang menasar pada pemilih milenial. Melalui pembentukan konten yang sesuai, hal ini dapat mendorong pendekatan sosiologis dan psikologis kaum milenial yang mana dapat merasakan *political engagement* atau upaya untuk terlibat dalam politik, baik itu berpartisipasi dalam perkumpulan atau mengikuti berita perkembangan mengenai politik. Kedekatan partai dan kepentingan politik, mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam pemilu (Ramadhan, 2022; Susanto & Irwansyah, 2021).

Selain melalui konten digital, lembaga pemerintahan bisa mulai melibatkan generasi muda sejak dini. Salah satu contohnya melalui Gerakan Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, yakni program pengawasan pemilu dari Bawaslu. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pemilu, Bawaslu telah membuat kemajuan yang memungkinkan lebih banyak pihak memahami tanggung jawab, prinsip, dan fungsi pengawasan pemilu di masa mendatang yang akan berdampak pada peningkatan jumlah pemilih yang berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilu (Yusrin & Salpina, 2023).

Kaum muda juga bisa ikut berpartisipasi aktif dalam sebuah organisasi yang telah diakui oleh Bawaslu, yang bernama Koalisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan kelompok pemantau pemilu lainnya. Organisasi tersebut bekerja secara sukarelawan. Dengan demikian melalui 3 program di atas dapat mengubah gerakan moral (*moral force*) menjadi gerakan sosial (*social movement*) (Yusrin & Salpina, 2023).

Gambar 1.1 Sosialisasi**Gambar 1.** Sosialisasi kegiatan pemuda dalam kontribusi pengawasan pemilu

Sumber: Yusrin & Salpina, 2023

Kesimpulan dan Saran

Melalui tulisan ini maka dapat disimpulkan bahwa generasi milenial dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam partisipasi politik melalui media sosial karena kaum milenial merupakan masyarakat yang melek dengan teknologi. Dalam beberapa hasil penelitiannya yang mengatakan bahwa penggunaan teknologi atau media milenial ini sudah marak di kalangan kaum milenial dan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa generasi milenial lebih sering mendapatkan informasi yang berasal dari media sosial yang kebenarannya masih dipertanyakan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan juga perlu ikut serta dalam meningkatkan partisipasi aktif kaum milenial dengan memikirkan konten kreatif digital yang menyasar pada pemilih milenial. Lalu, mengadakan program yang dapat melibatkan kaum muda secara aktif dalam dunia politik, Gerakan Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, misalnya.

Sejalan dengan kondisi tersebut, lembaga pemerintahan harus terus aktif untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya partisipasi politik kaum milenial, supaya angka partisipasi politik kaum muda terutama Gen Z terus meningkat. Selain itu, milenial sebagai generasi yang tidak tumbuh dalam lingkup orde lama dan baru dapat menjadi tombak utama bagi Gen Z untuk lebih kritis dan menghargai kebebasan dalam mengungkapkan pendapat.

Daftar Pustaka

- Imayani, T. (2022). Partisipasi milenial dalam dinamika politik. *Jejak Pustaka*.
- Pahlevi, M. E. T., Khalyubi, W., & Khatami, M. I. (2021). Persepsi pemilih milenial dalam Pemilu serentak 2019 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.11>
- Ramadhan, D. (2022). Rasional-demokratis: Proyeksi partisipasi memilih kaum muda. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 144–158.
- Rustama, A. (2023, July 1). Partisipasi generasi milenial dalam meramaikan demokrasi di era digital. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/abdirustama3207/649e972008a8b55ea0149b52/partisipasi-generasi-milenial-dalam-meramaikan-demokrasi-di-era-digital>

- Susanto, R. D., & Irwansyah. (2021). Media sosial, demokrasi, dan penyampaian pendapat politik milenial di era pasca-reformasi. *Jurnal Lontar*, 9(1), 65–77.
- Sutomo, S., Miftahusyai'an, M., Al Kamil, M. S., & Mulyoto, G. P. (2022). Penerapan nilai-nilai pancasila untuk menumbuhkan sikap nasionalisme di MTS Ahmad Yani Jabung. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 95-104.
- Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi generasi millenial dalam mengawasi tahapan pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3), 9646–9653. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1842>
- Zaman, S., Politik, P. M., & Mellaz, A. (2024). Edukasi literasi politik dan media untuk generasi muda <https://repository.uin-malang.ac.id/14993/>
- Zulkarnaen, F., Adara, A. S., Rahmawati, A., Wartadiayu, L., & Pamungkas, M. D. (2020). Partisipasi politik pemilih milenial pada pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesia*, 5(2), 55–63. <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i2.4554>